

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Perkebunan Kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 - 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.
6. Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/ Lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (leading sektor dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 ha.
10. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
14. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.

15. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
16. Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.
17. Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
18. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan SK penunjukkan tentang kawasan hutan Provinsi Bengkulu.
19. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya) baik yang sudah dilekati hak, belum dilekati hak atau bekas hak.
20. Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Bengkulu tahun 2023-2024, yang selanjutnya disebut sebagai RAD – KSB Provinsi Bengkulu adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Bengkulu dengan memperhatikan aspek ekonomi sosial budaya dan ekologi.

21. Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat FOKSBI Bengkulu adalah forum multi-pihak untuk meningkatkan sinergitas dan keselarasan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD-KSB Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk menjadi panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, swasta, BUMN/ BUMD serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan penyusunan RAD-KSB Provinsi Bengkulu meliputi:
 - a. untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait peran sertanya dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik;
 - c. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD-KSB Provinsi Bengkulu dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

BAB IV : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-KSB Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi RAD-KSB Provinsi Bengkulu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu/ *mid-term* dan akhir periode RAD-KSB Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-KSB Provinsi Bengkulu kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD-KSB Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Provinsi Bengkulu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28-3-2024
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 28-3-2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,


HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2023-2024

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2023-2024

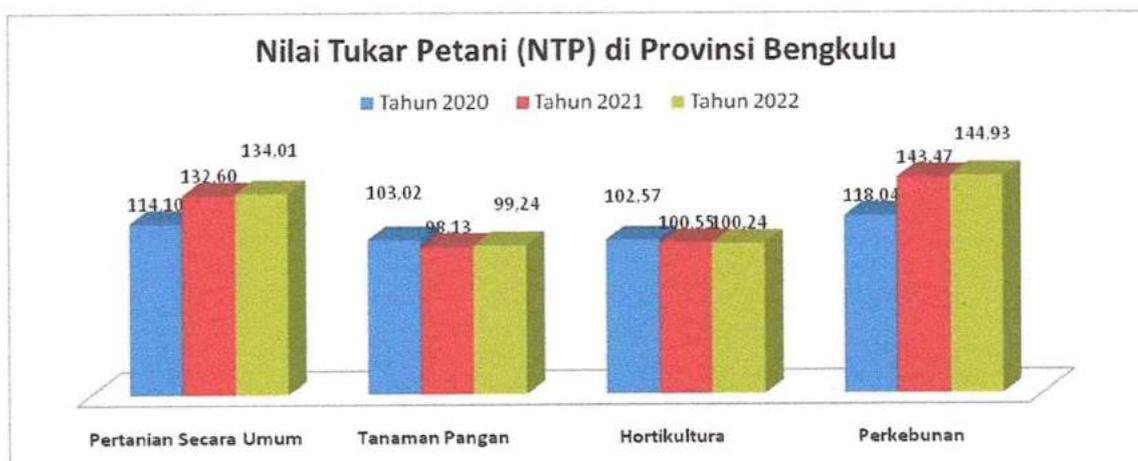
BAB I.
PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Sektor pertanian di Provinsi Bengkulu masih menjadi andalan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja serta sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industry.

Tahun 2022, sector pertanian memberikan andil terhadap PDRB sebesar 27,69 persen dan 15,86 persen diantaranya dari Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta menyerap tenaga kerja sebesar 45,79 persen. Mengingat pentingnya sector pertanian tersebut, maka perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026 telah ditetapkan 8 (delapan) komoditas Pertanian unggulan yang menjadi tolok ukur keberhasilan Pembangunan TPHP satu diantaranya adalah Produksi Sawit Rakyat. Usaha dalam rangka Sawit Rakyat tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Lima Tahunan dan Tahunan.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu.

Gambar 1.1. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022

Subsektor perkebunan menempati posisi yang strategis dan dominan dalam perekonomian Bengkulu, terutama untuk kelompok sektor non migas. Posisi tersebut tidak hanya dilihat dari peranannya dalam perekonomian, melainkan juga dari sisi penyerapan tenaga kerja, efek pengganda kegiatan ekonomi. Selain itu, pendapatan

keluarga Pekebun juga relative lebih baik dibandingkan komoditi pertanian lainnya yang ditunjukkan dengan nilai NTP paling tinggi.

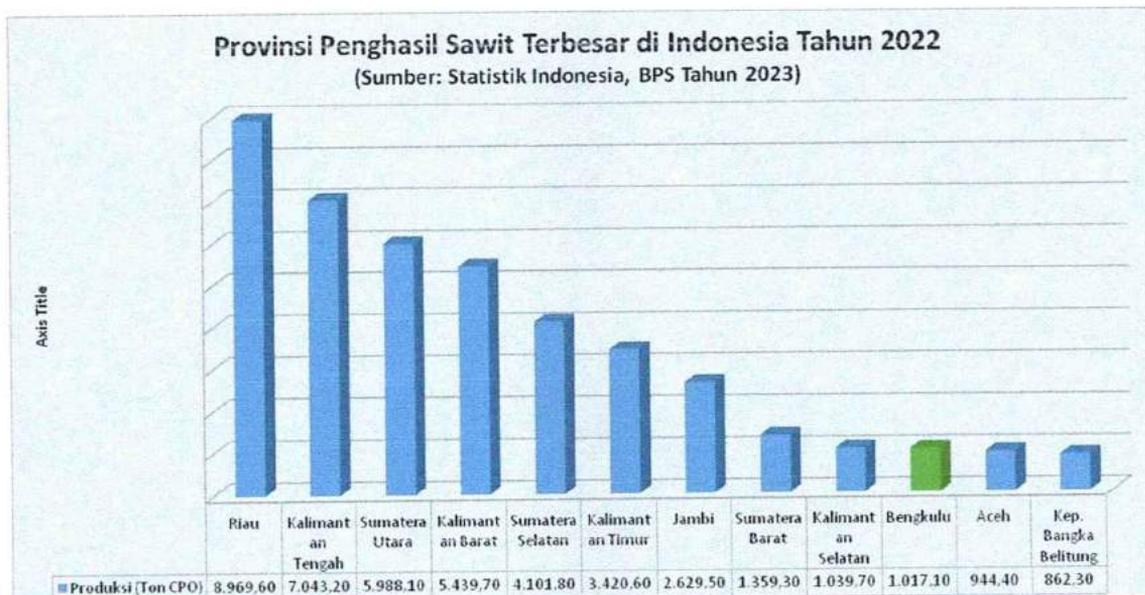
Sub sector perkebunan tetap tumbuh positif di saat krisis ekonomi dan pandemic Covid-19 tahun 2020. Di tahun 2021 dan 2022, sub sector perkebunan tumbuh paling tinggi, yaitu 5,81% dan 5,33%.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu.

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022

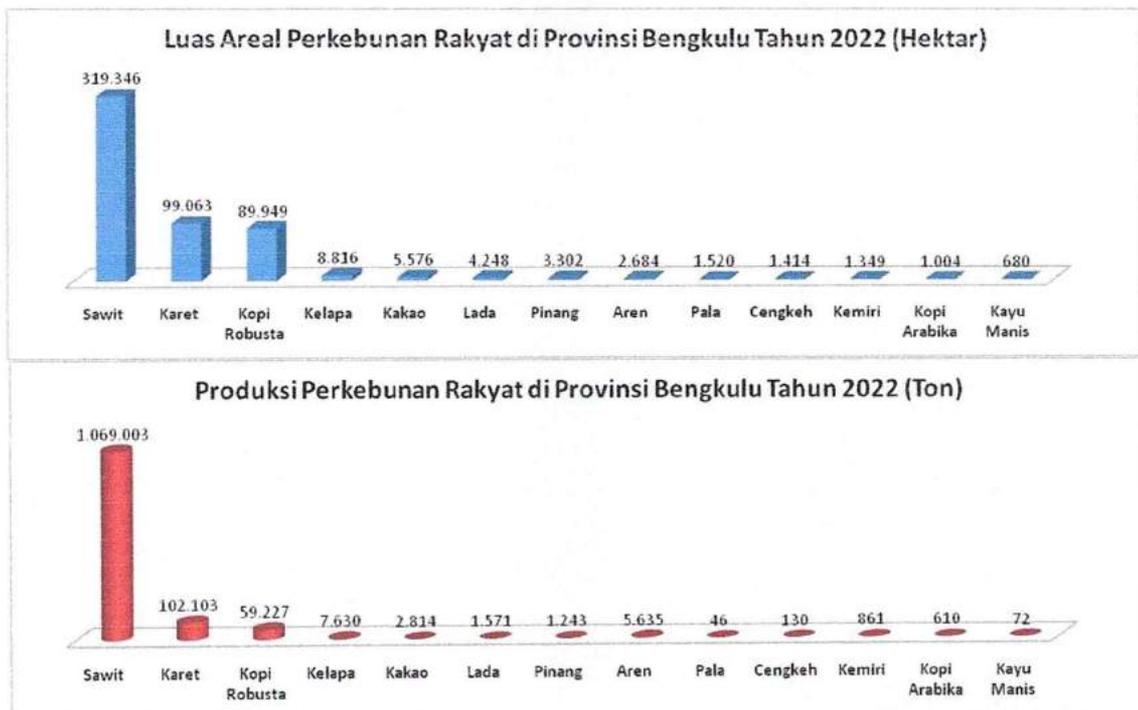
Sawit merupakan komoditi terluas yang diusahakan petani di Provinsi Bengkulu. Luas areal Sawit di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 sebesar 319.346 Hektar atau sekitar 60% dari luas perkebunan rakyat yang terdata. Produksi Sawit Rakyat di Provinsi Bengkulu sebesar 1.069.003 ton Crude Palm Oil (CPO) atau sekitar 85% dari total Produksi Perkebunan rakyat. Secara Nasional, Provinsi Bengkulu menempati urutan ke 10 penghasil CPO tertinggi di tahun 2022.



Gambar 1.3. Provinsi Penghasil Sawit Terbesar di Indonesia Tahun 2022

Luasa areal perkebunan besar tahun 2022, Sawit sebesar 94.604 hektar lebih rendah daripada tahun 2021. Karet 10.187 hektar, lebih rendah daripada tahun 2021. Kopi

seluas 3.140 hektar lebih rendah daripada tahun 2021. The seluas 914 hektar lebih rendah daripada tahun 2021.



Sumber: Buku Statistik Perkebunan Rakyat Provinsi Bengkulu, Dinas TPHP, 2023

Gambar 1.4. Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Selain perkebunan rakyat, sawit di Provinsi Bengkulu juga banyak diusahakan perkebunan besar swasta dan Negara. Tahun 2022, luas areal perkebunan Sawit milik Swasta/Negara sebesar 94.604 Hektar, sehingga luas Areal sawit keseluruhan sebesar 413.950 Hektar. Sedangkan Produksi CPO perkebunan Swasta/Negara tahun 2022 sebesar 485.017 Ton sehingga Produksi CPO keseluruhan sebesar 1.564.020 Ton.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu.

Gambar 1.5. Produksi dan Luas Areal Perkebunan Besar Swasta/Nasional di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Keberlanjutan industri kelapa sawit nasional masih menghadapi berbagai tantangan, demikian juga di Provinsi Bengkulu. Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk menynergikan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership). Diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RAN KSB, menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Tabel 1.1 Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020-2024

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PROP)/Proyek		Indikator	Proyek Prioritas Strategis (major project)
PP: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil dan industrialisasi		Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	
KP: Peningkatan Industri Pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir		Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	
Prov: Pengembangan Industri berbasis perkebunan			
1	Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
2	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan (Kasus)	
3	Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah daerah yang menyusun rencana dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (daerah)	
4	Nursery	Nursery (unit)	

Di tingkat daerah, Inpres RAN KSB mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan diinternalisasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 provinsi menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
Inpres No.18/2020 Lampiran III**

Target

Output/ Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya investasi, dan perluasan kesempatan kerja, serta pendayagunaan potensi unggulan daerah yang berkelanjutan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat	Pengelolaan LH, SDA dan Kelautan Perikanan	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	6 Prov Sumut, Kalteng, Jambi, Riau, Kalbar Sumsel,	12 Prov Sumut, Kalteng, JambiRiau, Kalbar, Sumsel, Kalsel, Aceh, Sumbar, Bengkulu, Sulse, Sulteng	12 Prov Sumut, Kalteng, JambiRiau, Kalbar, Sumsel, Kalsel, Aceh, Sumbar, Bengkulu, Sulse, Sulteng, Papua, BabelLampung, Kaltim, Kaltara, Sulbar	25 Prov Sumut, Kalteng, Jambi, Riau, Kalbar, Sumsel, Kalsel, Aceh, Sumbar, Bengkulu, Sulse, Sulteng, Gorontalo, Babel, Lampung, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sultra, Kepri, Papua, Papua Barat, Maluku, Jabar, Banten

Gambar 1.6. Target RAD_KSB pada RPJMN 2019-2024

Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat daerah kedalam perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Gambaran umum integrasi kebijakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.4.

Kesadaran publik akan keberlanjutan menuntut pengelolaan dan pengembangan perkebunan yang lebih lestari dan berkelanjutan, selain merupakan mandat RPJP Provinsi Bengkulu. Untuk mendukung pembangunan perkebunan tersebut perlu disusun sebuah Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Bengkulu.

Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti kedalam perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu.

1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud:

- 1) Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
- 2) Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

Tujuan :

- a. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019.
- b. Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi

Bengkulu yang lebih terarah dan terintegritas dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

- c. Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026.

Sasaran :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu;
- b. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui :
 1. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
 5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024.

12. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia No 38-2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia-peraturan-2022
13. Keputusan menteri pertanian republik indonesia nomor: 40/kpts/sm. 200/ i / ii / 2020 Tentang penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta di kawasan perkebunan kelapa sawit berbasis kelembagaan ekonomi petani
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 – 2043;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

1.4. PROSES PENYUSUNAN RAD-KSB

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB, Pemerintah Daerah mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:

1. Integrasi

RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.

2. Sinkronisasi

RAD-KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

3. Partisipasi

RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

BAB II.
INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN
RAN-KSB DAN RENSTRA OPD

2.1. Gambaran Umum Permasalahan Perkebunan Sawit

A. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Data Luas Perkebunan Sawit di Provinsi Bengkulu masih terdapat perbedaan antara berbagai pihak. Luas areal sawit sangat dinamis karena terus bertambah. Berdasarkan Kepmentan NO:833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang luas areal Tutupan kelapa Sawit, Luas areal Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu tahun 2019 adalah 426.508 Ha. Peta tutupan sawit ini belum diperbaharui, sehingga tidak mencerminkan keadaan terkini. Sedangkan berdasarkan data statistic perkebunan untuk perkebunan rakyat dan data BPS untuk perkebunan besar, luas areal Sawit 413.950 Ha.

Tabel 2.1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Areal Kelapa Sawit (Ha)		Selisih (Ha)	
		Data Statistik Perkebunan 2022	Peta Tutupan Sawit 2019	Hektar	%
I	Perkebunan Rakyat				
1	Bengkulu Selatan	28.806	27.680	- 1.126	- 3,91
2	Rejang Lebong	968	461	- 507	- 52,33
3	Bengkulu Utara	90.504	90.632	128	0,14
4	Kaur	9.579	12.379	2.800	29,23
5	Seluma	33.295	51.916	18.621	55,93
6	Mukomuko	108.944	108.938	- 6	- 0,01
7	Lebong	245	79	- 166	- 67,80
8	Kepahiang	115	48	- 67	- 58,03
9	Bengkulu Tengah	44.592	26.161	- 18.431	- 41,33
10	Kota Bengkulu	2.298	3.255	957	41,66
	Jumlah Kebun Rakyat	319.346	321.549	2.203	0,69
II	Luas Perkebunan Sawit (Besar dan Rakyat) Tahun 2022 (BPS Provinsi Bengkulu)	372.000	426.508	-54.508	- 12,78

Sumber: Data Statistik Perkebunan Provinsi Bengkulu dari Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2023
Peta tutupan Sawit sesuai Kepmentan NO:833/KPTS/ SR.020/M/12/2019
Luas Perkebunan Sawit Bengkulu Tahun 2022, Statistik Indoneisa, BPS 2023.

Permasalahan pada data tersebut karena beberapa hal:

1. Areal tutupan Sawit berubah setiap tahun karena perkebunan sawit rakyat terus bertambah, sehingga peta tutupan sawit perlu terus diupdate.
2. Areal perkebunan besar perlu disesuaikan dengan data HGU perusahaan besar;
3. Terdapat areal tutupan sawit yang berada di kawasan lindung, cagar alam atau sepadan sungai/pantai.
4. Areal perkebunan rakyat perlu divalidasi secara lebih akurat.

Perkebunan besar memiliki kewajiban membangun plasma sebesar 20% dari luas areal kebun perusahaan. Tahun 2022 ada sebanyak 58 perusahaan besar yang menyampaikan data ke Dinas TPHP dengan luas kebun inti 174.937 Ha. Sedangkan luas realisasi kebun ini sebesar 29.193 Ha. Luas kebun plasma masih lebih rendah dari kewajiban 20% dari luas kebun inti. Sedangkan luas kebun petani kemitraan belum terdata. Perlu divalidasi luas kebun plasma dan perusahaan yang memenuhi batas minimal.

Tabel 2.2. Jumlah Perusahaan, Luas Kebun inti, Luas Kebun Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Perusahaan	Luas Kebun Inti	Realisasi Kebun Inti	Luas Kebun Masyarakat	Realisasi Kebun Masyarakat
1. Muko muko	17	62.105	46.260	3.928	3.044
2. Bengkulu Utara	18	40.591	25.638	18.316	18.438
3. Bengkulu Tengah	9	8.899	7.536	1.100	608
4. Seluma	4	32.404	12.361	7.934	5.818
5. Kaur	6	25.698	25.006	1.773	910
6. Bengkulu Selatan	4	5.240	855	500	375
Grand Total	58	174.937	117.656	33.551	29.193

Sumber: Diolah dari Laporan perusahaan besar swasta/Negara, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, 2023

Legalitas lahan perusahaan besar perlu kepastian dan tidak ada tumpang tindih perizinan dan peruntukan. Lahan adalah sumber daya terbatas, pengusahaan monokultur untuk Sawit perlu di jaga agar tidak berdampak pada system ekologis. Perusahaan besar juga perlu mengutamakan penggunaan tenaga kerja local dan mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar Kebun sehingga berkelanjutan secara social. Penyediaan kebutuhan pokok pegawai perkebunan serta pembelian suku cadang perlu mengutamakan perusahaan local, sehingga efek pengganda dari perusahaan perkebunan dapat meningkatkan perekonomian local.

Pabrik CPO di Provinsi Bengkulu tahun 2022 tercatat sebanyak 34 unit yang dimiliki 28 Perusahaan. Total kapasitas terpasang pengolahan TBS sebanyak 1460,7 ton/jam. Kapasitas terpakai belum di ketahui, sehingga kecukupan pabrik CPO tidak diketahui. Pelayanan pembelian TBS petani yang belum bermitra dengan pabrik CPO tidak terpantau.

Tabel 2.3. Jumlah Perusahaan, Jumlah Pabrik CPO dan Kapasitas Terpasang Pengolahan TBS di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Perusahaan	Pabrik CPO				Kemitraan	
		Punya Kebun	Tidak Punya Kebun	Jumlah Pabrik (Unit)	Total Kapasitas Terpasang (ton/Jam)	Jumlah Kemitraan	Jumlah Petani
1. Muko muko	13	4	11	15	710	n/a	n/a
2. Bengkulu Utara	7	4	3	7	315	n/a	n/a

3. Bengkulu Tengah	4	1	3	4	150	n/a	n/a
4. Seluma		3	1	4	120,7	n/a	n/a
5. Kaur	2	1	1	2	90	n/a	n/a
6. Bengkulu Selatan	2		2	2	75	n/a	n/a
Jumlah	28	13	21	34	1.460,7	n/a	n/a

Sumber: Diolah dari Laporan perusahaan besar swasta/Negara, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, 2023
n/a= not available/data tidak tersedia.

Infrastruktur yang memadai dan terintegrasi khususnya yang menjangkau sampai ke seluruh pelosok di Provinsi Bengkulu sangat dibutuhkan dalam mendorong perkembangan ekonomi petani. Infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan mobilitas petani dan aksesibilitas lahan petani. Demikian juga ketersediaan jalan produksi/jalan usaha tani yang menuju ke lahan petani sangat dibutuhkan. Akses lahan meningkat akan menurunkan biaya produksi yang dikeluarkan petani, akan meningkatkan harga yang diperoleh petani dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Perlu dilakukan perbaikan jalan dan jembatan kewenangan provinsi, kabupaten dan desa di Provinsi Bengkulu.

Pabrik CPO menghasilkan limbah padat dan cair serta bahan berbahaya dan beracun yang perlu ditanganai agar tidak mencemari perairan dan merusak alam. Belum terpantau permasalahan penanganan limbah padat, limbah cair dan B3 dari Prabrik CPO. Penggunaan tenaga kerja local pada pabrik CPO juga perlu terus ditingkatkan disertai dengan pemberdayaan masyarakat setempat.

B. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun (Petani)

Petani menjadi aktor utama dalam pengembangan sektor perkebunan. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani menjadi amanat penting, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Rendahnya serapan pengetahuan terbaru oleh pekebun menyebabkan kurangnya upaya perbaikan input ke lahan. Pola pikir yang konvensional serta lemahnya kelembagaan petani juga menyebabkan kapasitas petani semakin rendah. Hal ini juga bersamaan dengan terjadinya kekurangan modal petani sebagai input ke lahan.

Tabel 2.4. Jumlah Kelompok tani dan kepemilikan lahan petani di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

No	Kabupaten	Kelompok Tani						Anggota yang Memiliki Lahan			
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Lain	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota	kurang dari 1 ha	1-2 ha	lebih dari 2 ha
1	Bengkulu Selatan	1.144	281	10	-	62	1.499	30.652	15.335	14.656	661
2	Rejang Lebong	1.057	130	5	-	14	1.206	19.757	6.150	13.088	519
3	Bengkulu Utara	1.511	307	20	1	42	1.882	42.251	16.401	25.177	673
4	Kaur	1.252	11	-	2	437	1.703	24.083	10.886	12.950	247
5	Seluma	1.412	36	1	-	17	1.466	30.474	15.253	14.900	321
6	Mukomuko	1.065	323	1	-	238	1.629	31.310	8.554	22.045	711
7	Lebong	882	128	-	-	1	1.011	14.737	9.378	5.285	74

8	Kepahiang	859	18	2	-	10	889	15.310	6.123	8.874	313
9	Bengkulu Tengah	525	134	-	-	263	922	12.625	4.099	7.489	1.037
10	Kota Bengkulu	290	95	2	-	1	388	6.428	5.485	760	183
	J u m l a h	9997	1463	41	3	1085	12595	227.627	97.664	125.224	4.739
	Persentase	79,37	11,62	0,33	0,02	8,61	100,00	100,00	42,91	55,01	2,08

Sumber : Simluhtan Kementerian Pertanian, di download pada Januari 2023.

Tahun 2022, tercatat pada Simluhtan Kementerian Pertanian, terdapat 12.595 Kelompok Tani. Sebagian besar kelompok tani tersebut termasuk ke dalam Kelas Kelompok Pemula (79,37%). Kelas Pemula menunjukkan kerjasama, kemandirian dan permodalan kelompok yang masih lemah. Berdasarkan luas kepemilikan lahan anggota, terdapat 97.664 KK petani memiliki lahan kurang dari 1 Ha atau sebanyak 42,91%. Dan Hanya 4.739 KK atau 2,08% anggota kelompok yang memiliki lahan lebih dari 2 Ha.

Persoalan pada usaha perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya produktivitas. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan “praktek budidaya yang baik” atau *Good Agricultural Practice/GAP* oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Permasalahan rendahnya produktivitas terutama terjadi pada perkebunan rakyat, karena kebun-kebun rakyat menggunakan bibit yang tidak bersertifikat. Pada kebun perusahaan produktivitas rata-rata 22-24 ton Tandan Buah Segar (TBS)/ha/tahun, sedangkan di kebun rakyat hanya sekitar 16-18 ton TBS/ha/tahun, sedangkan menurut visi Kementerian Pertanian, produktivitas kelapa sawit ditargetkan 36 ton TBS/ha/tahun dan rendemen 25%.

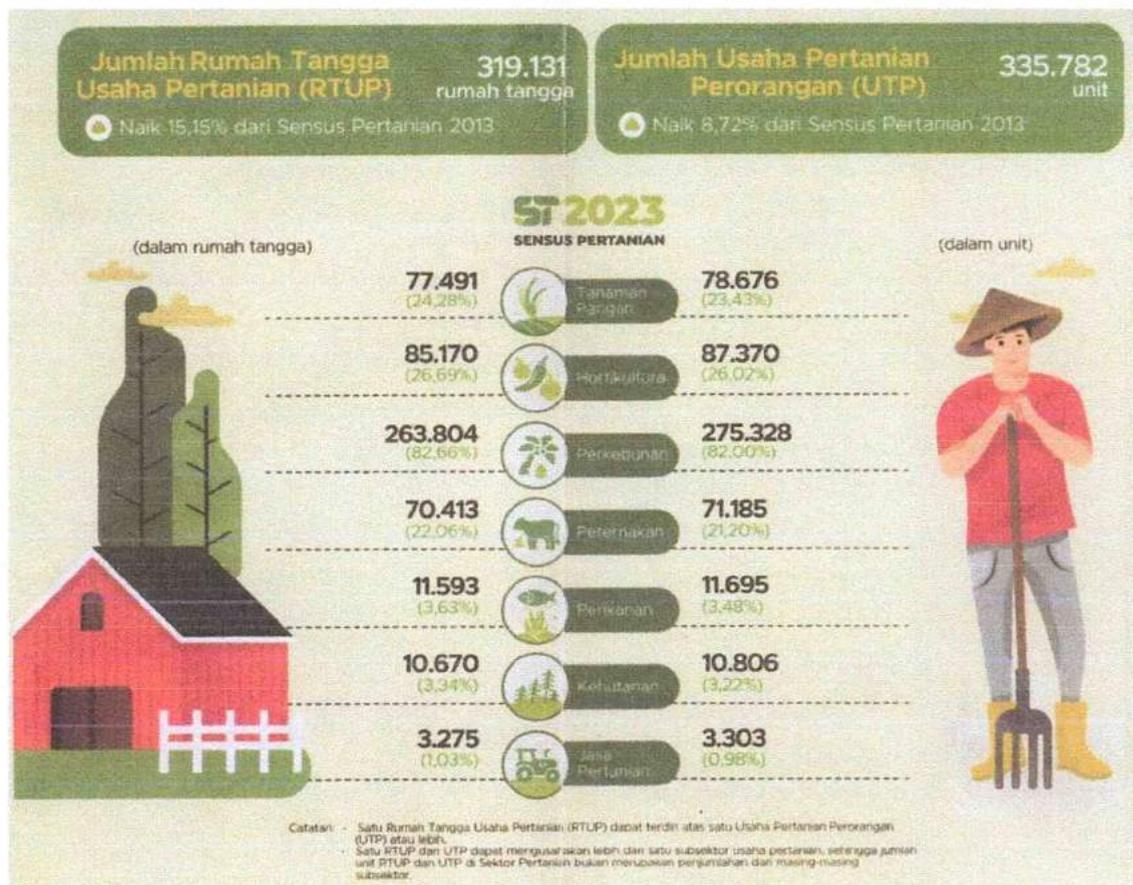
Tanaman tua dan rusak pada perkebunan kelapa sawit luasnya bertambah dari tahun ke tahun. Tanaman tua rusak yang perlu segera diremajakan menurut Statistik Perkebunan Bengkulu Tahun 2022 adalah seluas 10.476 ha perkebunan rakyat. Hambatan yang penting dalam permasalahan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat adalah tingginya biaya peremajaan dan hilangnya pendapatan selama masa tunggu yaitu selama tanaman belum menghasilkan, paling kurang selama tiga tahun.

Ancaman lain pada perkebunan rakyat adalah terdapat wilayah yang endemic Penyakit Ganoderma. Kemampuan petani mendeteksi dan mengatasi Ganoderma ini sangat rendah. Harga Bibit yang tahan Ganoderma masih jauh lebih tinggi daripada bibit yang biasa dipakai petani. Disisi lain, terdapat perusahaan Besar yang tergabung dalam APKSINDO menyediakan diri untuk ikut mendeteksi dan mendampingi dalam rangka mentasi Ganoderma tetapi belum dimanfaatkan Petani. APKASINDO juga siap mendukung penyediaan bibit unggul dengan harga terjangkau dalam rangka mensukseskan peremajaan Sawit petani yang sudah tidak produktif lagi. Termasuk di sini, APKSINDO bersedia menjalin kerja sama dalam rangka mendukung PSR di Provinsi Bengkulu.

Dari sisi perusahaan besar, ancaman yang sering terjadi adalah konflik kepemilikan

lahan, pencurian TBS serta akses penggunaan Jalan Perusahaan. Pencurian TBS diikuti dengan penjualan Brondolan ke Penadah. Permasalahan tersebut perlu terus di pantau dan dikomunikasikan ke masyarakat setempat.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 Tahap I Provinsi Bengkulu, terdapat 319.131 Rumah Tangga Usaha Pertanian, dan sebanyak 263.804 KK (82,60%) berusahan perkebunan. Dilihat dari jumlah usaha pertanian perorangan, terdapat 335.782 Petani dengan 275.328 (82,00%) adalah Pekebun.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Desember 2023.

Gambar 2.1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan Jumlah Usaha Pertanian Perorangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I Provinsi Bengkulu)

Dengan asumsi biaya peremajaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan dari P0 sampai dengan P3 kurang lebih sebesar Rp. 60 juta per ha, maka untuk pembiayaan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat diperlukan kurang lebih Rp. 628.560.000.000 (628,56 Miliar) . Sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka sejak tahun 2017 peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat diberikan bantuan hibah sebesar 25 juta per hektar untuk maksimal empat hektar per KK, dan mulai tahun 2021 bantuan hibah meningkat menjadi sebesar 30 juta per hektar. Realisasi peremajaan kelapa sawit rakyat di Provinsi Bengkulu dengan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sampai dengan tahun 2023 adalah seluas 13.334 ha, dengan data secara rinci disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Realisasi Replanting Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2023

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Bengkulu Tengah	0	0	1141	176	172	517	0	2.006
2	Bengkulu Utara	319	1000	1479	3155	0	0	80	6.033
3	Bengkulu Selatan	0	0	330	410	0	340	0	1.080
4	Mukomuko	0	563	591	930	409		791	3.284
5	Seluma	0	0	136	499	245		0	880
6	Rejang Lebong	0	0	0	0	0		51	51
		319	1563	3677	5170	826	857	922	13.334

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi PSR, Dinas TPIIP Provinsi Bengkulu, 2023

Dukungan Institusi perbenihan Pemerintah dalam produksi benih unggul. Di Provinsi Bengkulu terdapat UPTD Benih Provinsi yang bertugas menyediakan Benih Pokok sebagai bahan untuk penangkaran benih padi. Di level kabupaten terdapat UPTD perbenihan yang bertugas memproduksi benih sebar untuk Petani. Di Provinsi Bengkulu juga sudah berkembang penangkaran benih padi di tingkat kelompok tani serta terdapat Perusahaan Swasta yang memproduksi Benih Padi.

Tabel 2.6. Jumlah Penyuluh Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota / Provinsi	Penyuluh PNS Jumlah	Penyuluh Non PNS		Jumlah	%
			THL / Honorer	Swa daya		
1	Bengkulu Selatan	63	49	49	161	14,44
2	Rejang Lebong	43	14	42	99	8,88
3	Bengkulu Utara	54	51	70	175	15,7
4	Kota Bengkulu	26	9	22	57	5,11
5	Seluma	69	27	49	145	13
6	Kaur	51	39	19	109	9,78
7	Mukomuko	64	15	9	88	7,89
8	Lebong	41	6	42	89	7,98
9	Kepahiang	54	22	11	87	7,8
10	Bengkulu Tengah	46	9	8	63	5,65
11	Provinsi/Vertikal	36	6	-	42	2,96
	Jumlah	547	247	321	1.115	100
	%	49,06	22,15	28,79	100	

Tabel 2.7. Pengawas, Penangkar dan Pedagang Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Pengawas Benih	Penangkar Benih	Pedagang Benih
1	Bengkulu Selatan	1	9	4
2	Rejang Lebong	1	6	7
3	Bengkulu Utara	3	7	3
4	Kota Bengkulu	3	4	21
5	Seluma	2	6	3
6	Kaur	1	7	3
7	Mukomuko	2	5	11
8	Lebong	2	5	4
9	Kepahiang	1	9	7
10	Bengkulu Tengah	3	10	4
11	Provinsi	14	-	-
	Jumlah	33	68	67

Tahun 2022 terdapat 33 orang pengawas benih di Provinsi Bengkulu, dengan

penangkar sebanyak 68 orang dan Pedagang benih 67 unit usaha.

C. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Dalam konteks sektor perkebunan, isu strategis berkaitan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah (1) Mencegah Deforestasi karena perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab deforestasi terbesar; (2) Melindungi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yaitu Kawasan dengan tutupan hutan/koridor satwa liar, Kawasan gambut, sumber air, dan Kawasan hukum Adat; (3) Mencegah kebakaran lahan dan perkebunan dengan salah satu pendekatan berbasis masyarakat; (4) Mengelola limbah dari kegiatan perkebunan terutama sebagai sumber energi untuk sawit yang sejalan dengan rencana nasional; 5) yang tidak kalah pentingnya adalah mencegah permasalahan social, baik dalam bentuk kecemburuan social, marginalisasi masyarakat miskin serta kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Sebagai suatu sistem, lingkungan hidup memiliki batasan daya dukung dan daya tampung dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi Penduduknya. Salah satu tekanan terbesar terhadap lingkungan hidup terutama berasal dari pembangunan berbasis lahan termasuk perkebunan. Batasan luasan kepemilikan kebun perusahaan perlu di tegakan. Kawasan lindung, cagar alam dan sepadan pantai perlu terus di jaga. Teknik konservasi lahan dan air perlu dipantau penerapannya, baik di perkebunan besar maupun di perkebunan rakyat, sehingga daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan dilaksanakan kegiatan mitigasi sebagai upaya penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan. Kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan ini meliputi:

- 1) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
- 2) Penerapan teknik konservasi lahan dan air;
- 3) Pengembangan areal pada lahan nonkawasan hutan, semak belukar, dan lahan kritis;
- 4) Penggunaan pupuk secara berimbang dan pengembangan pembuatan kompos/pupuk organik;
- 5) Rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung bagi komoditi yang membutuhkan; dan Penerapan teknik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP).

Area dengan nilai konservasi tinggi merupakan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik untuk tingkat daerah maupun global. Beberapa kategori kawasan dengan nilai konservasi tinggi (NKT) antara lain adalah kawasan ekosistem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan perkebunan; kawasan hutan alam primer yang keberadaannya penting dalam sistem

hidrologi dan konservasi tanah; kawasan pelestarian keanekaragaman hayati; kawasan konservasi terhadap sumber dan kualitas air; serta kawasan dengan potensi erosi tinggi.

Dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan interpretasi, metode pendekatan, analisa dan standar pelaporan yang berbeda satu sama lain. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kesulitan para pengelola sumberdaya alam dalam menindaklanjuti hasil identifikasi NKT yaitu adanya rencana pengelolaan untuk dapat memelihara atau meningkatkan NKT dan pemantauan terhadap NKT yang teridentifikasi di dalam masing-masing unit pengelolaan. Pemantauan ini untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan NKT.

Permasalahan lingkungan di perkebunan antara lain adalah limbah pabrik kelapa sawit, dengan pengaduan masyarakat berupa pembuangan limbah ke badan sungai sehingga mencemari air sungai yang bisa membahayakan bagi masyarakat sekitar dan biota perairan lainnya serta mematikan ikan-ikan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Jumlah PKS di Provinsi Bengkulu mencapai 34 pabrik harus diawasi dengan ketat pengelolaan limbahnya agar tidak terjadi hal seperti tersebut di atas. Bagi PKS yang mempunyai kebun, limbah cair PKS dapat dijadikan pupuk cair melalui *land application* ke areal kebunnya. Permasalahan sering muncul pada PKS yang tidak memiliki kebun, yang di Provinsi Bengkulu ada sebanyak 21 perusahaan.

Limbah PKS atau lebih tepat disebut produk samping PKS ada tiga macam yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah padat berupa cangkang, *fibre*(serat), dan *sludge*. Cangkang mempunyai nilai jual yang tinggi dan diminati pasar luar negeri karena bias diolah menjadi biomassa pengganti batu bara. Serat dimanfaatkan untuk bahan bakar di *boiler* dan abunya untuk pupuk organik di kebun. Limbah cair digunakan sebagai pupuk cair organik, dan limbah gas berupa methane dapat diolah menjadi sumber energi untuk bahan bakar gas maupun listrik. Potensi limbah PKS tersebut disajikan pada Tabel 2.9. Pemanfaatan limbah atau produk samping ini sangat berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca di sub sector perkebunan.

D. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Pemerintah pusat dan daerah secara bersinergi, terus berupaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Sayangnya, hingga kini berbagai aturan ini belum berjalan optimal karena berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti kepastian lahan sampai persoalan data. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menyelesaikan tata kelola perkebunan sawit, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan 2019-2024, dan Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit.

Salah satu tantangan adalah mengenai kepastian status lahan perkebunan, hal ini menjadi faktor utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Berbagai permasalahan tata kelola sawit akan dapat diselesaikan jika telah dimiliki data yang terintegrasi dan valid terlebih di kawasan hutan. Kondisi ini untuk menjamin terlaksananya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan.

Tantangan lain adalah bagaimana menghubungkan Perusahaan besar dengan Petani, sehingga Perusahaan besar dapat meningkatkan kesejahteraan petani, bukan memiskinkan petani. Dengan demikian, keberadaan perusahaan besar akan dibutuhkan dan dilindungi petani, bukan didemo dan ditolak. Perlu dibangun kerjasama yang saling menguntungkan antara perkebunan besar dan petani. Perkebunan besar perlu secara transparan memenuhi kewajiban membina plasma dan bermitra dengan kelompok tani. Untuk itu, pembinaan kelembagaan petani yang berbadan hukum perlu terus ditingkatkan, perbaikan kualitas kebun petani melalui penggunaan bibit unggul dan budidaya yang baik perlu terus disosialisasikan.

Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk perkebunan Sawit antara lain: kesesuaian tata ruang pengembangan kawasan perkebunan; harmonisasi aturan perkebunan; Konservasi lahan dan air dengan berbagai teknik; pengelolaan sistem informasi; optimalisasi target perluasan sesuai dengan luasan dalam dokumen perencanaan; pencegahan alih fungsi lahan Pangan menjadi komoditas sawit; dan optimasi lahan/peremajaan tanaman-tanaman perkebunan kelapa sawit yang sudah berumur tua dan kurang produktif.

E. Dukungan Percepatan ISPO dan Peningkatan akses pasar kelapa sawit

Kelembagaan petani sawit perlu di tingkatkan menjadi Berbadan hukum sehingga dapat mengikatkan Kontrak dengan perusahaan besar dalam mitra yang setara. Akses permodalan petani baik ke perbankan maupun lembaga keuangan lainnya perlu difasilitasi sehingga ketergantungan pada Tekulak dan lembaga penyalur kredit tidak resmi dapat dikurangi. Untuk itu, kelembagaan penyuluhan, baik dari pemerintah, swadaya maupun peran dari fasilitasi pendampingan oleh perusahaan besar perlu terus dibangun. Termasuk di sini, kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih perlu terus di tingkatkan sehingga peredaran benih palsu yang sangat merugikan petani dapat ditekan.

Kesadaran petani untuk mengikatkan Surat tanda daftar usaha perkebunan (STDB) untuk sawit perlu terus ditingkatkan. Data Petani PSR dan petani yang sudah STDB perlu dibangun dan mudah diakses.

Tabel 2.8. Matriks Sinkronisasi RAN dan Rentra OPD

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR									
1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik									
1.1.	Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian
1.2.	Melakukan pemutakhiran Informarasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kelapa sawit yang termutakhir	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. BIG 4. BPS 5. Pemprov 6. Pemkab/kota 7. Pelaku Usaha 	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
1.3.	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	1.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara bekala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kemen ATR/BPN 4. BIG 5. BPS 	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
		1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi	2021	2022	2023	2024		6. BDPKPS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 1. Pelaku Usaha	
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit									
2.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	2021	2022	2023	2024	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
2.2.	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif	2021				Badan Informasi Geospasial	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kemendagri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
2.3.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif. 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	2021	2022	2023	2024	Badan Informasi Geospasial	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya									
3.1.	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. BPDPKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kemenkominfo 5. Kemenaker 6. BPDPKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit									
4.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	2021	2022	2023	2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kementerian Perdagangan 5. Kemendagri 6. BPDPKS	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
4.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga	2021	2022	2023	2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kemen PPN/Bappenas 2. Kemenkeu 3. Kementan 4. Kemen LHK 5. Kemen ATR/BPN 6. Kemendag 7. Kemendagri 8. BPDPKS 9. BIG 10. BPS	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit									
5.1	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2021				1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit									
6.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kemendagri 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kementan 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. BPDPKS 6. Pemprov 7. Pemkab/Kota	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSE)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif									
7.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2021				Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemenaker 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
7.2	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi	2021	2022	2023	2024		1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kepolisian Republik Indonesia 6. Kejaksaan Republik Indonesia 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN									
8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat									
8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. BPDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8.2	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN perkebunan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8.3.	Mengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terjalannya kerja sama di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN perkebunan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8.4.	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
8.5.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)									
9.1.	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	2021				Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
9.2.	Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. BDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
9.3.	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. BDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
9.4.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun									
10.1.	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenkeu 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
10.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. BPDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
10.3.	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. BPDPKS 3. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
10.4.	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
10.5.	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. BPDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
11. Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun									
11.1.	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1.Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2021	2022	2023		Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa,	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
		11.1.2 Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023			Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	
11.2.	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala				2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenkop dan UKM 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa, PDT dan Trans 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
11.3.	Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun	2021				Kementerian Pertanian	1. Kemendag 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
11.4.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemenkop dan UKM 2. Kementerian Desa, PDT dan Trans 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit									
12.1.	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
12.2.	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemendagari 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
12.3.	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
12.4.	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN									
13.	Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan								
13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT	2021				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
13.2	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.1.2. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit 13.1.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
			2021	2022	2023	2024			
13.3	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
13.4	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kalaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
13.5	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	2021	2022	2023		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
13.6	Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten /kota penghasil kelapa sawit 13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2021 2021				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
14.	Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan								
14.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendagri 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BNPB 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14.3	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit 14.3.2. Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	2021 2021	2022 2022	2023 2023	2024 2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendes PDTT 3. BNPB 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
14.4	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindaklanjut hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BNPB 3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14.5	Menyusun Peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait KTPA	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendes PIDTT 3. Kementan 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
15.	Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan								
15.1	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.2	Penyusunan Pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
15.3	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> , dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.4	Menyusun <i>database</i> nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sector perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.5	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.6	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
16.	Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (<i>measurement, reportin, and verification</i>/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit								
16.1	Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa Sawit	16.1.1 Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 Provinsi 16.1.2 Terverifikasinya penurunan emisi diperkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
16.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
17.	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit								
17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	2021	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
17.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	2021				Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
17.3	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit	2021	2022			Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Hutan
17.4	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2021	2022			Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Hutan
18.	Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi								
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2021	2022			Kementerian Pertanian	1. Kemenko 2. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kemen LHK 4. BPDPKS	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
18.2	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	2021	2022			Kementerian Pertanian	1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	2021	2022			Kementerian Pertanian	1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
19.	Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi								
19.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energi terbarukan	19.1.1 Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan POME sebagai energi alternatif 19.1.2 Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen BUMN 4. Pemprov 5. Pemkab/kota 6. Pelaku usaha	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA									
20.	Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat								
20.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau peyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	2021				Kementerian Pertanian	1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
20.2	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	2021				Kementerian Pertanian	1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
21.	Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain								
21.1	Membentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain 21.1.2 Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan	2021				Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
21.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
21.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan 21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2021 2021	2022 2022	2023 2023	2024 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
22.	Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan								
22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
22.2	Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	2021				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
22.3	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang	22.3.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi	2021				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov	Program Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
	terindikasi dalam kawasan hutan	dalam kawasan hutan 22.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan 22.3.3. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan	2021					4. Pemkab/Kota	
22.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukkan kawasan hutan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
23.	Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan								
23.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. KemenLHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektor
23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan	1. Kementan 2. KemenLHK 3. Kemendagri 4. Pemprov	Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektor

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
	perkebunan kelapa sawit	kelapa sawit					Nasional	5. Pemkab/Kota	
24.	Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut								
24.1	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang " <i>clear and clean</i> " dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	2021	2022	2023		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
24.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	24.2.1. Tersedianya data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2021	2022	2023		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
		24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2021	2022	2023	2024			
		24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2021	2022	2023	2024			
25.	Program Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit								
25.1	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	2021				Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota	Program Pengawasan Ketenagakerjaan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
25.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku usaha	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
25.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminisasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminisasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Badan 3. Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku usaha	Program Pembinaan Ketenagakerjaan
25.4	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa Sawit	2021	2022	2023	2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. BPJS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha	Program Pembinaan Ketenagakerjaan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT									
26.	Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional								
26.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	2021	2022	2023		Kementerian Pertanian	1. Kemendag 2. Badan Standarisasi nasional 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1. Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
		26.2.2. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO	2021	2022	2023	2024			
27.	Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun								
27.1	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
27.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	27.2.1. Meningkatnya jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
		27.2.2. Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	2021	2022	2023	2024			

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
27.3	Menyusun Panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2021	2022			Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota	Program Penyuluhan Pertanian
27.4	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2021	2022	2023	2024	Kementerian Pertanian	1. BPDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
27.5	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	2021	2022			Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. BSN 4. BPDPKS	Program Penyuluhan Pertanian
28.	Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional								
28.1	Menyusun Strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2021				Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.2	Melakukan Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2021	2022	2023	2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.3	Menyusun Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2021	2022	2023	2024	Kementerian Perdagangan	1. Kemen Luar Negeri 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4				-5	-6	-7
28.4	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2021	2022	2023	2024	Kementerian Perdagangan	1. Kemenlu 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.5	Melakukan Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	28.5.1. Terwujudnya Kerjasama dengan negara- negara konsumen melalui berbagai program 28.5.2. Tercapainya kesepakatan dengan negara-negara importer menuju keberterimaan ISPO				2024 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. BSN 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

2.2.Matriks Rencana Aksi

Setelah dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan RAD KSB terhadap RAN KSB, maka disusun kegiatan. Kegiatan daerah dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kegiatan dan sub kegiatan disusun dalam matriks Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024 disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Matrik Rencana Aksi Daerah

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
A. PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi penyusunan angka sementara/angka tetap Produksi TPHP	2023	2024	DTPHP	1. Kementerian Pertanian, 2. Dinas Kab/Kota yang menangani perkebunan	APBD, APBN
			Koordinasi Penetapan Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	2023	2024	DTPHP		
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							
2.1	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.1.1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Luas Replanting (Peremajaan Sawit Rakyat) yang didampingi	2023	2024	DTPHP	1. Dinas Kab/Kota yang menangani perkebunan, 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	APBD, APBN, BPDPKS
3	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
3.1	Pasca panen, pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan	3.1.1. Standarisasi Produk	Rintisan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang didampingi	2023	2024	DTPHP	1. Kementerian Pertanian, 2. Dinas Kab/Kota yang menangani perkebunan	APBD, APBN
		3.1.2. Rintisan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sawit rakyat	Tersedianya data STDB Provinsi Bengkulu	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/kota,	APBD, APBN (Dana TP)
3.2	Pendataan dan pemetaan perkebunan rakyat	3.2.1. Penerbitan STDB	Tersedianya data STDB Provinsi Bengkulu	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/kota, 2. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)	APBD, APBN (Dana TP)
4	Program Dukungan Manajemen							

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
4.1	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	4.1.1. Pelaksanaan statistik perkebunan	Dokumen statistik perkebunan Provinsi Bengkulu	2023	2024	DTPHP	1. Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu, 2. Dinas Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan	APBN (Dana DK)
5	Stranas-Pk Program Perbaikan Tata Kelola Data Dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan Dan Perkebunan							
5.1	Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	5.1.1. Rekonsiliasi, kompilasi, dan integrasi data dan IGT perizinan usaha perkebunan dan IGT indikatif perkebunan besar yang diperbarui secara berkala	Tersedianya database dan IGT perizinan usaha perkebunan	2023	2024	Diskominfotik	1. Bappedalitbang Provinsi Bengkulu, 2. Badan Informasi Geospasial (BIG), 3. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/Kota	CSO
			Tersedianya IGT indikatif perkebunan besar.	2023	2024	Diskominfotik	1. Bappedalitbang Provinsi Bengkulu, 2. Badan Informasi Geospasial (BIG), 3. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/Kota	CSO
		5.1.3. Pemetaan perizinan dan kelembagaan usaha perkebunan	Tersedianya peta perizinan dan kelembagaan usaha perkebunan	-	2024	Diskominfotik	1. DPMPTSP, 3. BIG, 4. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/kota	APBD
5.2	Penyelenggaraan pemetaan perkebunan partisipatif	5.2.1. Pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pemetaan	2023	2024	DTPHP	1. Dinas Kab/kota yang membidangi perkebunan, 2. CSO, 3. ASPEKPIR, 4. APKASINDO	CSO
		5.2.1. Pelaksanaan pemetaan partisipatif Perkebunan Kab/Kota	Tersedianya peta perkebunan kab/kota	2023	2024	DTPHP	1. BPN, 2. BIG, 3. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/kota, 4. APKASINDO	CSO

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
5.3	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) perkebunan Provinsi Bengkulu	5.3.1. Pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG) terintegrasi dengan berbagai stakeholder	Tersedianya WebGIS perkebunan Provinsi Bengkulu.	2023	2024	DLHK	1. Bappedalit bang, 2. Diskominfotik, 3. BPN	CSO
		5.3.2. Pemetaan komoditas perkebunan	Tersedianya peta komoditas perkebunan	-	-	DTPHP	Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBD
6	Program Perizinan Usaha Pertanian							
6.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2023	2024	DTPHP	Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu	APBD
			Kesepakatan Harga Pembelian komoditas unggulan(TBS) oleh perusahaan besar swasta/nasional	2023	2024	DTPHP	1.Dinas Perindag, 2.Perusahaan Pabrik CPO, 3.Asosiasi Petani Sawit	APBD
			Pergub Tentang RAD-KSB Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026	2023	2024	DTPHP	Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu	APBD
			SK Gubernur Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD-KSB Provinsi Bengkulu	2023	2024	DTPHP	Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu	APBD
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Pra-Sarana Pertanian							
7.1	Penataan prasarana pertanian	7.1.1. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jalan Sentra Produksi yang dibangun/ditingkatkan	2023	2024	DTPHP	1. Dinas PUPR, 2. Dinas yang membidangi Perkebunan kab/Kota	APBD

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
	sarana pertanian	Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	perkebunan, a. Peremajaan kebun kelapa sawit, b. Diversifikasi tanaman kelapa sawit di perkebunan rakyat, c. Pendukung kegiatan peremajaan perkebunan			DTPHP	Benih, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	
7.3	Nilai tambah dan daya saing industri	7.3.1. Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar	Luas lahan tanaman kelapa sawit yang dikembangkan	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 2. GAPKI, 3. ASPEKPIR, 4. APKASINDO	APBN TP
7.4	Membangun database data perkebunan kelapa sawit yang terbuka bagi publik	7.4.1. Membangun database data perkebunan kelapa sawit yang terbuka bagi publik	Terlaksananya keterbukaan informasi di sektor perkebunan kelapa sawit bagi publik	2023	2024	DIKOMINFOTIK	1. BIG, 2. DTPHP, 3. DLHK, 4. DPMPTSP, 5. Dikominfotik Kab/kota, 6. Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/kota.	APBD
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
8.1	Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)	8.1.1. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD)	Terlaksananya Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA RPRKD	2023	2024	Bappeda Prov Bengkulu	1. DLHK, 2. DTPHP, 3. Dinas ESDM, 4. Dinas Kelauantan dan Perikanan, 5. Dinas perternakan dan Keswan, 6. Dinas Perhubungan, 7. Disnaker, 8. Disperindag	CSD

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
		8.1.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	2023	2024	Bappeda Prov Bengkulu	1. DLHK, 2. DTPHP, 3. Dinas ESDM, 4. Dinas Kelautan dan Perikanan, 5. Dinas peternakan dan Keswan, 6. Dinas Perhubungan, 7. Disnaker, 8. Disperindag	APBD
9	Program Pelayanan Penanaman Modal							
9.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	9.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah pelaku Usaha yang dilakukan pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi Jumlah Pelaku Usaha yang didampingi dalam penyelesaian permasalahan Jumlah Pelaku Usaha yang bermitra dengan Pelaku Usaha Kecil	2023	2024	DPMP TSP Provinsi Bengkulu	OPD Teknis	DAK
B	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN SERTA PERCEPATAN PEREMAJAAN							
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian							
10.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	10.1.1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sosialisasi Penggunaan Benih Bersertifikat Rekomendasi Produsen Benih, Pengedar Benih, pembelian bahan benih Rekomendasi Produsen Benih, Pengedar Benih, pembelian bahan benih Rekomendasi Produsen Benih, Pengedar Benih,	2023	2024	DTPHP	1. Kementerian Pertanian, 2. Dinas Kab/Kota, 3. Produsen Benih, 4. APKASINDO,	APBD, APBN

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			pembelian bahan benih Sertifikat Benih					
		10.1.2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Produksi Benih Perkebunan bersertifikat di UPTD BIT HP & PP Jumlah Penyaluran Benih Perkebunan bersertifikat Jumlah Dokumen pengawasan mutu Peredaran benih Perkebunan	2023	2024	DTPHP	1. Kementerian Pertanian, 2. Dinas Kab/Kota, 3. Produsen Benih, 4. APKASINDO,	APBD
10.2	Pengawasan peredaran sarana pertanian	10.2.1. Pengelolaan penerbitan sertifikat benih	Tersedianya benih yang diawasi dan disertifikasi	2023	2024	DTPHP	1. Perusahaan Sumber Benih, 2. Produsen Benih, 3. Pelaku Usaha	APBN
		10.2.2. Penertiban izin usaha produsen benih	Tersediannya data perizinan usaha produsen benih	2023	2024	DTPHP	1. DPMPTSP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN
		10.2.3. Sosialisasi dan pengembangan kemitraan perbenihan	Terselenggaranya sosialisasi dan pengembangan kemitraan perbenihan	-	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/kota, 2. Produsen Benih, 3. Perusahaan Perkebunan Besar	APBD, ABPN, CSO
		10.2.4. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih perkebunan :	Tesedianya benih perkebunan	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/kota, 2. Pelaku Usaha, 3. Perusahaan Perkebunan Besar	APBD, ABPN, CSO
		10.2.5. Pendataan peredaran benih di Provinsi Bengkulu	Tersedianya data peredaran benih di Provinsi Bengkulu	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/kota, 2. Pelaku Usaha	APBD, APBN

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
11	Program Perizinan Usaha Pertanian							
11.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Petunjuk Teknis Pembelian dan Penjualan TBS	√	√	DTPHP	1. Kementerian Pertanian, 2. Disperindag, 3. Dinas Kab/Kota, 4. Mitra	APBD, APBN
12	Program Peremajaan Kelapa Sawit							
12.1	Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun	12.1.1. Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP)	Terselenggaranya sosialisasi PKSP, Terlaksananya PKSP, Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKSP, Meningkatnya akses pendanaan PKSP	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi Perkebunan kab/kota, 2. BDPKKS, 3. Perbankan	BDPKKS
13	Program Penyuluhan Pertanian							
13.1	Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	13.1.1. Kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta	Tersedia kelembagaan penyuluhan yang ditingkatkan kompetensinya di 10 kabupten/kota	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi Perkebunan kab/kota, 2. Dinas yang membidangi Penyuluhan Kab/Kota	APBD
		13.1.2. Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Tersedia tenaga penyuluh ASN yang ditingkatkan kompetensinya di 10 kabupaten/kota	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi Perkebunan kab/kota, 2. Dinas yang membidangi Penyuluhan Kab/Kota	APBD
13.2	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	13.2.1. Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Terlaksananya diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi Perkebunan kab/kota, 2. Dinas yang membidangi Penyuluhan Kab/Kota	APBD
		13.2.2. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya pelatihan Penyuluh/ pendamping, Pengurus KUD/GAPOKTAN/ POKTAN, Tokoh masyarakat untuk 10 kab/kota	-	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi Perkebunan kab/kota, 2. Dinas yang membidangi Penyuluhan Kab/Kota	APBD

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
		13.2.3. Pelatihan budidaya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP)	Terlatihnya pekebun kelapa sawit di 10 kab/kota	2023	2024	DTPHP	ASPEKPIR, APKASINDO, Dinas yang membidangi perkebunan Kab/Kota	CSO, BDPKPS
		13.2.4. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit	2023	2024	DTPHP	ASPEKPIR, APKASINDO, Dinas yang membidangi perkebunan Kab/Kota	CSO, BDPKPS
14	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
14.1	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	14.1.1. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian	-	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi Perkebunan kab/kota, 2. Dinas yang membidangi Penyuluhan Kab/Kota	APBN
	14.2 Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	14.2.1. Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani	Jumlah pelaku usaha integrasi sapi-kelapa sawit yang difasilitasi permodalannya (pelaku usaha)	2023	2024		1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi peternakan kab/kota, 3. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN
C.	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN							
15	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
15.1	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	15.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT yang difasilitasi	2023	2024	DTPHP	Dinas Kab/kota yang membidangi perkebunan	Pelaku Usaha
		15.1.2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan	2023	2024	DTPHP	Dinas Kab/kota yang membidangi perkebunan	APBN DK
16	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
16.1	Perlindungan Perkebunan (Dekon)	16.1.1. Perangkat Perlindungan Perkebunan (Dekon)	Operasional laboratorium lapangan, Pemberdayaan petugas pengamat OPT, Operasional brigade pengendalian OPT Perkebunan	2023	2024	DTPHP	1. DLHK, 2. BPBD, 3. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN, Pelaku Usaha, CSO
16.2	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	16.2.1. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Fasilitasi, inventarisasi, identifikasi serta penanganan kasus gangguan usaha perkebunan	2023	2024	DTPHP		
		16.2.2. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tan. Perkebunan	Luas fasilitasi penanganan OPT	2023	2024	DTPHP		
		16.2.3. Desa pertanian organik berbasis perkebunan/integrasi sawit ternak	Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik	2023	2024	DTPHP		
17	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)							
17.1	Pengumpulan limbah b3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	17.1.1. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 perusahaan perkebunan	Jumlah dokumen persetujuan teknis terkait pengumpulan limbah B3 perusahaan perkebunan	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
18.1	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	18.1.1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup perusahaan perkebunan	Jumlah dokumen pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup perusahaan perkebunan	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
		18.1.2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen profil GRK Provinsi Bengkulu	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
18.2	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	18.2.1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah dokumen informasi peringatan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
18.3	Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	18.3.1. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Sosialisasi Program Penurunan Emisi GRK di Kabupaten/Kota 2) Mengidentifikasi dan inventarisasi Program penurunan emisi GRK di kabupaten kota 3) Menghitung penurunan emisi setiap tahun untuk sektor Pertanian, kehutanan, transportasi, energi dan Limbah 4) Melaporkan hasil penurunan emisi per 6 bulan ke Gubernur Bengkulu dan ke Bappenas 5) Melakukan Kaji Ulang Dokumen RAD-GRK tahun 2018-2030 6) Menyusun Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Bengkulu sampai tahun 2022 7) Menyusun Dokumen 	2023	2024	BAPPEDA Prov. Bengkulu	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Provinsi Bengkulu tahun 2022-2045					
19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)							
19.1	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati provinsi	19.1.1. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Jumlah taman KEHATI yang dikelola perusahaan perkebunan (areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT))	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
20	Program Perencanaan Lingkungan Hidup							
20.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi	20.1.1. Penyusunan dan penetapan RPPLH provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Bengkulu	2023	2024	DLHK	1. Bappedalitbang, 2. DTPHP, 3. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 4. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
		20.1.2. Pengendalian pelaksanaan RPPLH provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH provinsi	2023	2024	DLHK	1. Bappedalitbang, 2. DTPHP, 3. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 4. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
20.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	20.2.1.. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Jumlah Dokumen KLHS Revisi RTRWP Bengkulu yang disusun	2023	2024	DLHK	1. Kemen LHK, 2. Bappedalitbang, 3. DTPHP, 4. Dinas PUPR, 5. Perguruan Tinggi	APBD
		20.2.1.. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	2023	2024	DLHK	1. Kemen LHK, 2. Bappedalitbang, 3. DTPHP, 4. Dinas PUPR, 5. Perguruan Tinggi	APBD
21	Program Pengelolaan Hutan							

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
21.1	Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	21.1.1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
		21.1.2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
		21.1.3. Pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pengembangan rehabilitasi lahan	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
21.2	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	21.2.1. Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Patroli pengamanan kawasan hutan	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
		21.2.2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Patroli karhutla dan sosialisasi pada desa rawan karhutla/ Masyarakat Peduli Api) MPA	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
21.3	Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	21.3.1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah patroli karhutla dan sosialisasi pada desa rawan karhutla/ MPA	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN
22	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)							
22.1	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah	22.1.1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Laporan pengelolaan DAS	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD, APBN

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
	provinsi							
23	Program Pengelolaan Energi Terbarukan							
23.1	Pelaksanaan konservasi energi wilayah provinsi	23.1.1. Dukungan energi baru terbarukan berbasis perkebunan	Jumlah data pembangkit energi terbarukan yang dibangun	2023	2024	ESDM	1. DLHK, 2. DPMPTSP, 3. Pelaku Usaha	Pelaku Usaha
24	Program Peningkatan Rantai Ekonomi							
24.1	Meningkatkan rantai nilai ekonomi perkebunan kelapa sawit melalui sistem integrasi dengan peternakan	24.1.1. Meningkatkan jumlah perusahaan dan petani/peternak yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani/peternak yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan	2023	2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. DTPHP, 2. Eappedalitbang, 3. BRINDA, 4. Dinas yang membidangi kab/kota, 5. BRIN, 6. BPDPKS	APBD, APBN, BPDPKS, Pelaku Usaha
25	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan							
25.1	Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	25.1.1. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD
		25.1.2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD
D.	TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA							
26	Program Perizinan Usaha Pertanian							

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
26.1	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	26.1.1. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian, terdiri dari :	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian ➢ Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian ➢ Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan ➢ Terlaksananya pemantauan pengembangan energi baru terbarukan berbasis perkebunan ➢ Jumlah izin usaha yang ditertibkan dan ➢ tersedianya data fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 	2023	2024	DMPTSP	1. DLHK, 2. BPN, 3. DTPHP, 4. Dinas yang membidangi Perkebunan kab/kota, 5. Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Kab/kota, 6. GAPKI, 7. Pelaku Usaha	APBD
26.2	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	26.2.1. Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, terdiri dari :	Terlaksananya penanganan gangguan usaha perkebunan, Terlaksananya penanganan gangguan usaha perkebunan	2023	2024	DTPHP	1. BPN, 2. DLHK, 3. BPDB, 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 5. Dinas yang membidangi kab/kota.	APBD
27	Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan							
27.1	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	27.1.1. Pelaksanaan pengawasan norma kerja di perusahaan	Jumlah perusahaan yg dilakukan pemeriksaan pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan penegakan hukum	2023	2024	Disnakertrans	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Nakertrans kab/kota	APBD

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
		27.1.2. Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan	2023	2024	Disnakertrans	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Nakertrans kab/kota	APBD
		27.1.3. Pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma K3	2023	2024	Disnakertrans	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Nakertrans kab/kota	APBD
28	Program Pembinaan Ketenagakerjaan							
28.1	Peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	28.1.1. Peningkatan penerapatan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, Perusahaan yang melaporkan keadaan perusahaan pada Wajib Laporan Online Perusahaan (WLKP)	2023	2024	Disnakertrans	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Nakertrans kab/kota, 4. Kepolisian, 5. Kejaksaan	APBN
29	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup							
29.1	Penyelesaian pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) provinsi	29.1.1. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi	Jumlah penyelesaian kasus	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	APBD
30	Program Pengelolaan Hutan							
30.1	Pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan provinsi	30.1.1. Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	Jumlah kab/ kota yang dikeluarkan dokumen rekomendasi penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota, 4. BPN, 5. DMPTSP	APBD

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
30.2	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	30.2.1. Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha kawasan hutan produksi	2023	2024	DLHK	1. DTPHP, 2. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota, 3. Dinas Lingkungan Hidup kab/kota, 4. BPN, 5. DMPTSP	APBD
31	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan							
31.1	Pembinaan pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	31.1.1. Pembentukan tim mediasi penanganan sengketa lahan di Provinsi Bengkulu	Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan di Provinsi Bengkulu	2023	2024	BPN	1. DTPHP, 2. DLHK, 3. Badan Kesbangpol, 4. Kantor Pertanahan Kab/kota, 5. Dinas yang membidangi peternakan kab/kota, 6. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN
		31.1.2. Penyusunan data pemetaan kasus pertanahan di Provinsi Bengkulu	Tersedianya data pemetaan kasus pertanahan di Provinsi Bengkulu	2023	2024	BPN	1. DTPHP, 2. DLHK, 3. Badan Kesbangpol, 4. Kantor Pertanahan Kab/kota, 5. Dinas yang membidangi peternakan kab/kota, 6. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN
		31.1.3. Pelatihan mediator penanganan kasus lahan	Tersedianya tenaga mediator untuk kasus lahan	2023	2024	BPN	1. DTPHP, 2. DLHK, 3. Badan Kesbangpol, 4. Kantor Pertanahan Kab/kota, 5. Dinas yang membidangi peternakan kab/kota, 6. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
		31.1.4. Pembentukan tim reformasi agraria tingkat provinsi dan kab/kota	Terlaksananya program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	2023	2024	BPN	1. DTPHP, 2. DLHK, 3. Badan Kesbangpol, 4. Kantor Pertanahan Kab/kota, 5. Dinas yang membidangi peternakan kab/kota, 6. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN
		31.1.5. Penyelesaian sengketa pada lahan HGU melalui program Tanah Objek Reforma Agraria	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat provinsi dan 12 kabupaten/kota	2023	2024	BPN	1. DTPHP, 2. DLHK, 3. Badan Kesbangpol, 4. Kantor Pertanahan Kab/kota, 5. Dinas yang membidangi peternakan kab/kota, 6. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN
32	Program Sertifikasi Lintas Sektoral							
32.1	Sertifikasi lahan sub sektor perkebunan	32.1.1. Penerbitan sertifikasi lahan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat	Terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) perkebunan rakyat	2023	2024	BPN	1. DTPHP, 2. DLHK, 3. Kantor Pertanahan Kab/kota, 4. Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota	APBN
E.	DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK SAWIT							
33	Program Perizinan Usaha Pertanian							
33.1	Penertiban izin usaha	33.1.1. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Terselenggaranya penilaian usaha perkebunan Terselenggaranya fasilitasi sertifikasi ISPO Terselenggaranya	2023	2024	DTPHP	1. Dinas Kab/kota yang membidangi perkebunan, 2. BPDPKS, 3. Civil Society Organization (CSO)	APBD, APBN, BPDPKS, Pelaku Usaha

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD Mitra/Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			sosialisasi ISPO Terselenggaranya pelatihan ISPO bagi pekebunan					
34	Penyuluhan Pertanian							
13.2	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	13.2.1. Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Terlaksananya diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	2023	2024	DTPHP	1. Dinas yang membidangi Perkebunan dan Penyuluhan Kab/Kota	APBD

BAB III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi Implementasi RAD-KSB

Rencana aksi ini merupakan rencana kerja pada berbagai OPD, instansi dan pihak terkait. Oleh karena itu perlu diperhatikan keterkaitan antar bidang dan antar rencana strategis/rencana aksi dalam penentuan tahapan dan prioritas waktu dalam pelaksanaan. Rencana aksi peningkatan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu berdasarkan Potensi dan peluang di Provinsi Bengkulu, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

No	Pengelompokan Rencana Aksi	Komponen				
		Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar
1	Perijinan usaha dan ketaatan hukum usaha perkebunan					
2	Regulasi dan Peraturan					
3	Payung hukum kepada petani dan kelembagaannya					
4	Pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan (Intensifikasi, Peremajaan dan Ekstensifikasi)					
5	Sumber daya Manusia					
6	Produktivitas dan pengolahan TBS					
7	Penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit					
8	Replanting Sawit Rakyat					
9	Pengelolaan energi terbarukan berbasis kelapa sawit					
10	Implementasi CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit					
11	Diversifikasi usaha dan kemitraan Kelembagaan petani					
12	Penguatan kelembagaan koperasi dalam mekanisme koorporasi petani					
13	Penguatan Kemitraan intiplasma dan petani swadaya koperasi perusahaan					

Gambar 3.1. Bagan Implementasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024

Rencana aksi didominasi dalam bidang manajemen perkebunan dan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya terdapat keterkaitan antar bidang terutama dalam pengelolaan produk perkebunan kelapa sawit secara lestari khususnya untuk perkebunan rakyat selain adanya pengembangan industri turunan dan samping dari pengelolaan produk samping

kelapa sawit. Selain itu perlu memastikan adanya penguatan terhadap kelembagaan koperasi sebagai bentuk dari korporasi petani.

RAD KSB Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024 ini tidak dalam pelaksanaan memerlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait, yang perlu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB.

3.2. Pembiayaan

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pengembangan kawasan perkebunan, maka operasionalisasi organisasi pelaksana ini harus didukung dengan sumber pembiayaan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota. Dukungan pembiayaan dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancang bangun dan rencana aksi pengembangan kawasan yang telah ditetapkan.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja pengembangan Komoditi unggulan sangat ditentukan oleh keberhasilan manajemen pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan yang diukur dari tingkat produksi, produktivitas dan pendapatan di skala unit pelaku usaha dan skala kewilayahan. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengembangan harus dilihat dari aspek teknis, yaitu:

1. Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Komoditas Kelapa Sawit

Tingkat produktivitas dan produksi komoditas merupakan indikator outcome dari pengembangan kawasan perkebunan. Tingkat produktivitas komoditas unggulan yang dikembangkan di kawasan kabupaten/kota harus lebih tinggi dari sebelumnya dan sekurang-kurangnya harus lebih tinggi dari nilai rata-rata kabupaten. Adapun pertumbuhan produksi sekurang-kurangnya harus dapat mencapai target nasional yang diproyeksikan di setiap kabupaten/kota.

2. Meningkatnya Aktivitas Pasca Panen dan Kualitas Produk

Keberadaan aktivitas usaha pasca panen akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas pasca panen diukur dari meningkatnya kualitas hasil dan bertambahnya jumlah dan jenis aktivitas, penggunaan alat serta mesin penanganan pasca panen.

3. Meningkatnya Aktivitas Pengolahan dan Nilai Tambah Produk

Keberadaan aktivitas usaha pengolahan mencerminkan bahwa kawasan hulu hingga hilir, kecuali untuk komoditas yang memang lebih menguntungkan bagi petani jika dijual dalam bentuk produk segar. Peningkatan aktivitas pengolahan akan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dan dapat diukur dari bertambahnya volume komoditas yang diolah, bertambahnya jumlah dan jenis usaha pengolahan produk, penggunaan alat, serta mesin pengolahan.

4. Meningkatnya Jaringan Pemasaran Komoditas hingga ke Tingkat Ekspor

Peningkatan jaringan pemasaran dapat diukur dari semakin luasnya jangkauan pemasaran, bertambahnya pelaku usaha pemasaran (trader), semakin luasnya jaringan pemasaran (regional dan internasional), bertambahnya volume dan nilai perdagangan komoditas yang dipasarkan, berkurangnya volume produk yang gagal dipasarkan, terjaminnya kontinuitas volume pasokan serta terjaminnya stabilitas harga produk yang dipasarkan. Disamping itu, peningkatan jaringan pemasaran pada kawasan juga mencakup kemampuan pemasaran untuk masuk ke pasar ekspor, terutama untuk komoditas yang berorientasi ekspor dan berdaya saing tinggi.

5. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Komoditas

Meningkatnya produksi, produktivitas, aktivitas pengolahan dan jaringan pemasaran pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Namun demikian peningkatan pendapatan ini harus dapat dinikmati secara proporsional kepada semua pelaku, terutama kepada para petani.

6. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesempatan Berusaha

Peningkatan aktivitas pada kawasan perkebunan mulai dari hulu hingga hilir akan diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan produksi, produktivitas, aktivitas pengolahan hasil serta pemasaran akan menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha.

7. Meningkatnya Aksesibilitas terhadap Sumber Pembiayaan,

Pasar Input dan Ouput, Teknologi dan Informasi Pengembangan kawasan perkebunan akan meningkatkan kapasitas kelembagaan, jaringan kemitraan, dan terbukanya akses pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan dan permodalan, pasar input (sarana produksi), pasar output (hasil segar dan olahan), teknologi serta informasi. Peningkatan akses terhadap pembiayaan dapat diukur dari jumlah dan nilai kredit yang disalurkan. Peningkatan akses pasar input dapat diukur dari penggunaan input sesuai kebutuhan. Peningkatan akses pasar output dapat diukur dari peningkatan volume perdagangan dan ekspor. Peningkatan akses teknologi dapat diukur dari penerapan teknologi baru. Peningkatan terhadap akses informasi dapat diukur dari meningkatnya posisi tawar petani.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Bengkulu ini mempunyai jangka waktu 2 tahun (2023-2024). Rencana aksi ini menjadi dasar dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir sehingga keunggulan komparatif sumber daya alam ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama petani. Dengan adanya RAD-KSB ini diharapkan Pengembangan wilayah yang mensinkronkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku .

Rencana Aksi Daerah yang berdurasi 2 tahun ini akan dapat membawa manfaat secara berkelanjutan, jika menjadi bagian yang utuh dalam rencana pembangunan pertanian dan perkebunan untuk Provinsi Bengkulu. Adanya kesinambungan antar tahapan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat, sehingga evaluasi periodik capaian setiap tahap sangat diperlukan.

Periode berlakunya Rencana Aksi Daerah ini sesuai jangka waktu RAN-KSB yaitu 2023-2024 dan mengacu RPJMD Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, seiring dengan perubahan RPJMN nantinya, maka RAD-KSB ini perlu dilakukan revisi sehingga menjadi bagian yang utuh dalam rencana pembangunan pertanian dan perkebunan untuk Provinsi Bengkulu.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Yng
HENDRI DONAN, S.H.,M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005